

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai keberagaman dan kekayaan yang mempunyai banyak potensi untuk dapat dieksplorasi. Potensi di Indonesia menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia dengan adanya karakteristik yang khas berupa kearifan lokal. Sebagai pemerintah daerah yang berperan untuk menciptakan potensi baru untuk bergerak lebih maju dalam melakukan pembangunan atau pengembangan pariwisata baik di desa maupun kota agar mampu dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan mutu hidup secara efisien. Dalam penelitiannya oleh Simamora dan Rudi (2016: 80) pemerintah daerah sangat penting dalam membuat kebijakan untuk pembangunan pariwisata agar dapat memajukan pariwisata nasional dan pertumbuhan pariwisata akan terus dilindungi agar tetap stabil.

Sebagai langkah dalam meningkatkan banyaknya wisatawan, yaitu dengan mengembangkan pariwisata bahari. Menurut Putu dan Vany (2022) Pariwisata merupakan perjalanan yang berputar bernilai dimana dapat pergi dari satu tempat ke tempat lain. Banyak akademisi dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sosiologi telah lama memperdebatkan definisi pariwisata. Selain itu, wisata laut merupakan salah satu jenis pariwisata. menikmati keindahan pada laut yang menjadi bagian dari daya tarik wisata, adapun kegiatan yang dapat dilakukan pada

saat berkunjung ke obyek wisata bahari dengan hadirnya beberapa aktivitas yang didukung dengan peralatan modern semisal *speedboat*, *diving*, *snorkeling*, serta acara tradisional dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat seperti ritual-ritual sebagai wujud syukur atas melimpahnya ikan hasil tangkapan.

Kota Bontang, merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian besar wilayahnya 70% lautan dan 30% merupakan wilayah daratan. Salah satu Kampung yang menjadi obyek wisata yaitu Kampung Selangan menjadi salah satunya perkampungan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari. Pada tahun 2000, Kampung Selangan mendapatkan bantuan dari PT. Pupuk Kaltim (Kalimantan Timur) yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kota Bontang dengan memproduksi pupuk kimia. Kampung Selangan menerima program tersebut yang berfokus pada fasilitas untuk membantu para nelayan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat setempat sehingga PT. Pupuk Kaltim memberikan bantuan berupa benih ikan, perawatan perahu dan mesin, keramba jaring serta pinjaman uang (Sembiring & Cholidha, 2020).

Seiring berjalannya waktu, masa program tersebut sudah berakhir, sehingga masyarakat tidak dapat melanjutkan budidaya ikan dan merevitalisasi keramba jaring. Dengan demikian, masyarakat Kampung Selangan tak mampu guna melanjutkan aktivitas pembudidayaan keramba serta menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan semata, untuk mengembangkan dan memberdayakan Kampung Selangan, Pemerintah Kota Bontang harus mengambil upaya dan

bertanggung jawab dalam melibatkan pelaku usaha atau perusahaan swasta dalam mengembangkan dan memberdayakan Kampung Selangan.

Kemitraan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bontang sehingga pengembangan ini direalisasikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Badak LNG (*Liquefaction Natural Gas*), yang merupakan bagian dari salah satunya perusahaan besar di Kota Bontang dan perusahaan tersebut telah banyak memberikan kontribusi secara profesional untuk Kota Bontang. Pemerintah Kota Bontang dan CSR PT. Badak LNG sepakat untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Selangan. Dengan bantuan tersebut, Kampung Selangan resmi menjadi kampung wisata terapung sejak tahun 2018 silam dan dikenal dengan nama Selangan City sebagai kawasan wisata bahari. Kampung ini terdapat bangunan-bangunannya yang terlihat rapi membuatnya semakin menarik bagi wisatawan maupun masyarakat yang ingin bersinggah. Selain didukung oleh Pemerintah Kota Bontang, program CSR PT. Badak LNG, pengembangan kampung tersebut didukung pula oleh PT. Jotun Indonesia yang bertanggung jawab atas pengembangan wisata Kampung Selangan hingga saat ini penuh dengan keindahan dan penuh warna sehingga pemerintah Kota Bontang berterima kasih atas kesediaan dan tanggung jawab kepada PT. Badak LNG untuk bekerjasama dalam meningkatkan pariwisata khususnya pada kawasan wisata bahari melalui program CSR.

Gambar 1.1
Kampung Selangan setelah di revitalisasi.



Sumber: <https://www.celebes.co/borneo/pulau-selangan-bontang>

Kampung Selangan yang dikenal saat ini dengan nama Selangan City sebagai nama objek wisata, merupakan kampung wisata yang terletak di tengah-tengah perairan selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 6.600 meter persegi serta dihuni oleh 48 kepala keluarga. PT Badak LNG merupakan salah satu perusahaan yang telah merencanakan pengembangan Kampung Selangan menjadi objek wisata Selangan City di Kelurahan Bontang Lestari. Awalnya Kampung Selangan merupakan sebuah tempat pemukiman dan persinggahan masyarakat yang melintas. Sebagian besar penduduk kampung selangan bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Masyarakat pesisir tidak terpengaruh dengan kenyataan bahwa berada di tengah lautan karena darah nenek moyang seorang pelaut yang mengalir ke masyarakat setempat, hingga saat ini dan tidak akan pernah lepas. Daerah Selangan merupakan daerah nelayan kecil dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, berada di dekat pesisir Hutan Mangrove Bontang Lestari dan dikelilingi oleh lautan yang indah ditambah, terdapat terumbu

karang dan pemandangan bawah laut yang indah. Kampung Selangan memiliki potensi wisata seperti Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi perwakilan dari Kampung Selangan.

Kampung nelayan yang bersih dan asri ini layak dikunjungi bagi pengunjung yang ingin mencari ketenangan dan menghindari hiruk pikuk kota. Wisatawan yang datang ke Kampung Selangan juga dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, seperti snorkeling, bermain kayak, dan memancing di keramba. Pengunjung dapat mencoba kuliner khas Kampung Selangan yang dibuat oleh ibu-ibu kampung tersebut sambil bersantai dan menikmati pemandangan yang indah. Wisatawan dapat memilih berbagai alternatif makanan, seperti ikan asap santan, udang galah, ikan palumara, gami bawis, dan ikan kerapu bakar. Namun bagi wisatawan yang ingin menikmati makanan khas Kampung Selangan dapat memesan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, wisatawan dapat menyewa *homestay* di Kampung Selangan jika ingin tinggal lebih lama dan untuk kamar di Kampung Selangan memiliki dua tipe kamar dengan fasilitas yang memadai dan pastinya membuat pengunjung merasa nyaman berada di Kampung Selangan.

Konsep pariwisata yang memanfaatkan konsep berbasis masyarakat ataupun *Community Based Tourism* yang berarti, bahwa selain pemerintah dan swasta yang berkontribusi, masyarakat ikut andil pada proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan dalam pengembangan yang dijadikan sebagai Kawasan wisata bahari. Konsep pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi

masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan. Kampung Selangan atau Selangan City terlihat seperti pelangi yang berwarna-warni di tengah lautan jika dilihat dari kejauhan. Tidak hanya kampungnya yang berwarna-warni, tetapi keindahan laut dan segala aktivitas yang dilakukan oleh warganya membuat kampung wisata terapung menjadi lebih baik dan indah. Sebagai pelaku dan penggerak dalam industri salah satunya industri pariwisata, masyarakat berperan penting dalam pengembangan pariwisata agar dapat diberikan pemahaman secara utuh. Kampung Selangan memiliki potensi pariwisata dengan sumber daya alam melimpah yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Selain itu, di Kampung Selangan juga menyediakan berbagai fasilitas seperti bermain kayak, pemancingan keramba, dan terdapat beberapa jenis ikan yang hanya ditemui diperairan Kampung Selangan.

Selain konsep yang telah disebutkan sebelumnya, Kampung Selangan menggunakan konsep "kampung wisata" digunakan di kampung tersebut. Kampung wisata adalah tempat yang memiliki kearifan lokal dengan wilayah atau potensinya semisal adat istiadat, budaya, serta pengelolaan potensi sebagai daya tarik wisata sesuai kemampuan, yang diperlihatkan bagi kepentingan sosial serta perekonomian masyarakat serta pengetahuan yang khas dari sebuah masyarakat ataupun budaya tertentu yang sudah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun sebagai hasil atas hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungannya yang dikenal sebagai kearifan lokal ataupun sistem pengetahuan lokal (Hermawan, 2016). Pariwisata merupakan sebuah perjalanan ke destinasi yang memiliki keunikan

estetika, sejarah, budaya, dan lainnya yang dapat memenuhi harapan untuk pelaku perjalanan atau wisatawan. (Rosita, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1990 mengenai kepariwisataan, pada Pasal 3 yang berbunyi bahwasanya fungsi pariwisata adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan yang disertai dengan rekreasi dan perjalanan serta dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan dilanjutkan dengan Pasal 4 yang mengatakan bahwasanya kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, menjaga kelestarian alam, dan menanggulangi pengangguran.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan destinasi wisata lokal, pemerintah daerah dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, yang harus merencanakan dan menetapkan kebijakan pariwisata agar dapat menguntungkan wisatawan dan penduduk lokal. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur serta peningkatan potensi sebagai daya tarik wisata dapat menjadi hasil dari pengembangan tersebut (Afandi, 2016). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang bernomor 12 Tahun 2020 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2021-2025 pada Pasal 1 Nomor 7 yang menjelaskan bahwa kepariwisataan terdiri dari berbagai macam kegiatan wisata dan rekreasi serta didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sedang Pasal 1 Nomor 8 yang memberi penjelasan bahwasanya, kepariwisataan ialah suatu hal yang terkait dengan pariwisata, yang meliputi berbagai aspek serta disiplin ilmu yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap negara, keterkaitan antarmasyarakat setempat, wisatawan, pemerintah daerah serta pengusaha. Dalam Pasal 6 Huruf d yang menjelaskan bahwa pariwisata mencakup instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan regulasi, sumber daya manusia, dengan tata kelola yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan pariwisata daerah yang berdaya saing dan keberlanjutan.

Sesuai peraturan Walikota Kota Bontang tentang Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2019-2021 dengan inovasi Pengembangan Destinasi Wisata Kampung di atas air (Bahari) yang menetapkan sebagai pengembangan wisata bahari di beberapa kampung di atas air yang mempunyai potensi besar guna dilakukan pengembangan menjadi destinasi wisata unggulan yakni Kampung Selangan, Kampung Tihi-Tihi, dan Kampung Melahing. Tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi pembangunan pariwisata yang dilakukan secara sinergis dan harmonis oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat secara menyeluruh, serta mengembangkan pulau-pulau pesisir sebagai destinasi wisata. Hal ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bontang, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata sehingga, pengembangan ini diinisiasi oleh Perangkat Daerah, membutuhkan anggaran dari APBD Kota Bontang, dan dibantu oleh CSR Perusahaan. Hal ini karena adanya kebijakan

pariwisata yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata.

Keterkaitan Pemerintah Kota Bontang yang melibatkan pemangku kepentingan dalam mengembangkan objek wisata tersebut, melalui adanya *collaborative governance* yang membentuk kolaborasi. Ansell & Gash (2008) menafsirkan *collaborative governance* sebagai sebuah pendekatan yang mana satu badan publik terhubung secara langsung dengan mitra non-pemerintah pada proses pengambilan keputusan kolektif secara formal, berdasarkan kesepakatan, beserta musyawarah yang tujuannya guna menyusun kebijakan publik ataupun pengelolaan program dan aset publik. Makna tersebut dapat saling digambarkan sebagai kondisi saling ketergantungan serta menjalin hubungan satu dengan lainnya.

Beberapa negara barat mulai merancang paradigma tersebut dengan meminimalkan sejumlah peran yang negara miliki dalam pembangunan serta pendelegasian kepada aktor lainnya. Sehingga dalam implementasinya mempunyai tiga aktor, yakni pemerintah, masyarakat, serta swasta yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Program pengembangan tersebut tak sekadar menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi pihak swasta ataupun masyarakat bisa berperan serta pada pengembangan pariwisata. Perihal tersebut memperlihatkan wujud kolaborasi yang mana dari beberapa tujuan yang dimilikinya, salah satunya ialah memberi jawaban atas keterbatasan yang pemerintah miliki dalam tata pengelolaan permasalahan pariwisata masih dihadapi berbagai negara berkembang dengan total penduduknya yang besar, salah satu di antaranya ialah Indonesia.

Pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan guna mengakomodasi kehendak wisatawan, sehingga mereka memperoleh kepuasan dengan kunjungannya serta dapat kembali berkunjung di lain kesempatan. Berbagai konsep pengembangan pariwisata bisa diimplementasikan di suatu objek daya tarik wisata tergantung dari lokasi, beserta sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang tersedia. (Akbar et al., 2022).

Berdasarkan paparan tersebut, bisa kita ketahui bahwasanya, Kampung Selangan sebelumnya mengalami kendala, terutama dalam hal program pengembangan dan pemberdayaan dari perusahaan yang sudah tidak lagi berjalan. Dalam penelitian ini peneliti hendak melakukan penggalian informasi berkenaan dengan kolaborasi yang dijalankan antara pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Selangan City. Selain itu, *collaborative governance* merupakan salah satu sistem kebijakan yang tepat dalam pengembangan pariwisata. Sistem ini digunakan agar pemerintah tidak hanya bekerja sendiri tetapi dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti swasta dan masyarakat agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata khususnya di Kampung Selangan dengan memberikan beberapa komponen seperti bantuan dan menyediakan fasilitas. (Nurdiansyah, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan kolaborasi dengan pemerintah Kota

Bontang, masyarakat Kampung Selangan, dan swasta dalam mengembangkan kampung wisata Selangan City?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, adapun tujuan yang bisa dicapai adalah guna menganalisis bagaimanakah pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah Kota Bontang, sektor swasta, dan masyarakat Kampung Selangan dalam pengembangan kampung wisata Selangan City.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharap mampu memberi manfaat dan kegunaan, baik secara teoretis ataupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh pada riset ini, di antaranya:

- a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengembangan kawasan wisata, khususnya di dalam Ilmu Pemerintahan.
- b. Dapat menambah wawasan mengenai studi pada *Collaborative Governance* dalam pengembangan kawasan wisata, terkhusus wisata bahari.

2. Manfaat Praktis

Adapun riset ini memberi manfaat praktis, yang dapat dijabarkan:

a. Bagi pemerintah

Riset ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah guna memberikan kesadaran terhadap warga tentang pengembangan kawasan wisata yang baik.

b. Bagi swasta

Menjadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan, khususnya sektor pariwisata.

c. Bagi masyarakat

Peneliti berharap bahwa, masyarakat mampu memberi gambaran umum mengenai pengembangan pariwisata serta apa yang sudah diraih. Hal ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas selanjutnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu menjadi bagian yang dapat melihat persamaan beserta perbedaan antara riset yang tengah ditempuh dengan riset yang sudah dilaksanakan, serta menguraikan perbedaan antara riset yang dijalankan dengan penelitian lain yang telah ada sebelumnya. Berikut ini adalah hasil riset sebelumnya beserta pernyataan yang peneliti anggap relevan dengan riset ini:

Pertama, riset yang dilaksanakan Hermansyah, Abd. Haris, dan Amirudin (2020) yang berjudul “*Model kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di*

Kabupaten Sinjai”. Riset tersebut menjelaskan fakta bahwa terdapat banyak potensi objek beserta daya tarik wisata yang tersebar penjuru Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi wisata bahari ini jika ditata dengan baik akan menjadi kekuatan baru bagi pengembangan wisata bahari di Kabupaten Sinjai, yang tentu akan membantu meningkatkan pariwisata bahari di Kabupaten Sinjai. Riset tersebut dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yang bermakna tidak mengandalkan bukti-bukti yang berasal dari logika matematis, prinsip-prinsip numerik, dan teknik-teknik statistik. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sinjai sangat diperlukan model pengembangan pariwisata yang bersifat kolaboratif namun Sementara itu, dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjai, peran yang masyarakat, swasta, serta media berikan dinilai belum efektif. Karenanya, model ini harus memasukkan dimensi kolaborasi antar-aktor yang melibatkan dinamika kolaborasi, kebebasan, serta determinasi pariwisata pada sisi destinasi dan infrastruktur pariwisata untuk mewujudkan peran aktor secara bersamaan.

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Gurvantry, Febriansah, dan Tampubolon (2022) yang berjudul “*Analisis Collaborative Governance dalam pembangunan kawasan desa wisata (studi pada Desa Wisata Ekang di Kabupaten Bintan)*”. Menurut penelitian ini, keindahan alam mempengaruhi posisi desa yang sangat strategis dan indah, Sehingga desa wisata diharuskan mampu memanfaatkan kekuatan tersebut guna memaksimalkan peluang untuk berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kekuatan keunikan beserta keindahan alam yang memesona.

Daya tarik yang ada di daerah tersebut salah satunya ialah adanya keindahan alam dengan mempertimbangkan dari hal-hal yang telah disebutkan tersebut serta mengamati bagaimanakah para pihak bekerjasama untuk membangun desa wisata di Desa E kang dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Riset tersebut memanfaatkan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan melalui teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hal kerjasama, Desa E kang menerapkan prinsip saling menguntungkan. Sejalan dengan kemitraan yang telah dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Desa E kang, dimana dapat saling menguntungkan diterapkan dan *collaborative governance* yang telah berkembang.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Bela & Utama (2022) yang berjudul “*Model Collaborative Governance dalam pembangunan pariwisata alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu*”. Riset tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan sosial di Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu pasca perusahaan milik negara PT. *Pertamina Geothermal Energy* (PGE) beroperasi secara komersial. Dengan bantuan PT. PGE dan model kerjasama pemerintah dalam pengembangan wisata alam di Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pemerintah desa, karang taruna, serta BUMDes dengan berusaha menjadikan desa tersebut sebagai desa wisata yang menjual keindahan alam beserta wisata sungai semisal arung jeram serta *river tubing*. Metode yang riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan digunakan untuk mengumpulkan informasi lewat pengamatan, *interview*, serta dokumentasi. Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa guna

pengembangan wisata alam di Kecamatan Ulu Ogan, dengan pendekatan *collaborative governance* menggunakan model gabungan dari Ansell & Gash dan Ratner. Model gabungan tersebut menekankan kepada proses diskusi untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang aktivitas kolaboratif.

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Deden Saputra (2020) dengan judulnya “*Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat*”. Berdasarkan analisis sumber informasi yang ada, masalah utama dalam riset tersebut ialah Desa Wisata Tamansari yang belum berkembang secara baik dikarenakan belum memenuhi kriteria sebagai desa wisata yang mandiri atau berkembang baik berdasar tersedianya sisi kelembagaan, produk, pelayanan, serta pengelolaan. Selain itu, desa wisata ini membutuhkan penguatan dan peningkatan kualitas. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif sebagai pendekatan. Untuk mengetahui tata kelola wisata digunakan Analisa data secara kualitatif dengan memaparkan membahas hal-hal yang berhubungan dengan penelitian untuk dapat mendeskripsikan tentang Tata Kelola Pengembangan Kampung Wisata Taman Sari di Kota Yogyakarta. Hasil diskusi yang menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat langsung pada pengembangan ialah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lurah Patehan, akademisi, pengelola desa wisata, serta pelaku atau media penyedia jasa pariwisata. Pola kerja sama pemerintah dengan masyarakatnya berwujud pembinaan serta kerja sama dengan akademisi beserta masyarakatnya yang dimanifestasikan melalui pengkajian merupakan contoh *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pengembangan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Tiya Paristha, I Nyoman Sukma Arida, dan Gde Indra Bhaskara (2022) yang berjudul “*Peran Stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Kerta kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar*”. Permasalahan yang dihadapi memerlukan upaya peningkatan pengelolaan potensi karena permasalahan yang dihadapi Desa Wisata Kerta yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengembangan, salah satunya dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kontribusi. Riset tersebut mempunyai tujuan guna mengkaji peran pemangku kepentingan serta menyusun model kerja sama untuk pengembangan Desa Wisata Kerta. Riset tersebut dijalankan melalui penggunaan pendekatan kualitatif menggunakan observasi serta wawancara langsung. Dalam hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasanya pemangku kepentingan telah melakukan apa yang harus mereka lakukan, tetapi keterlibatan mereka relatif rendah dalam dunia bisnis dan media. Dalam pengembangan Desa Wisata Kerta, model kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menempatkan masyarakat sebagai inti pengembangan dan didukung oleh akademisi, pemerintah, bisnis, dan media sebagai aktor pendukung. Masyarakat setempat, atau komunitas, dianggap sebagai penggerak utama kegiatan di desa wisata.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya tersebut, bisa ditarik simpulan bahwasanya judul riset saat ini adalah "Pengembangan kawasan wisata bahari melalui *Collaborative Governance* di Selangan City Kota Bontang." Riset ini bertujuan guna mengetahui bagaimana peran masing-masing *stakeholder* guna melakukan kolaborasi. Kemudian terdapat indikator dari Ansell & Gash

mengenai *collaborative governance* dan memiliki lima aspek proses kolaborasi yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, saling pengertian, beserta hasil. Sehingga stakeholder dalam proses kolaborasi, yang tersusun atas pemerintah, swasta, serta masyarakat. Fokus penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus yang serupa, yaitu menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Namun, stakeholder yang ada di dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan Kampung Selangan dengan merevitalisasi kampung nelayan menjadi objek wisata terapung yakni Selangan City hingga saat ini.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Collaborative Governance

Ansell & Gash (2008: 543) mengatakan bahwasanya *collaborative governance* merupakan pendekatan terbaru dalam tata kelola pemerintahan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum guna mencapai konsensus. Lebih lanjut, Ansell & Gash memaknai *collaborative governance* sebagai suatu tatanan tata kelola pemerintahan yang mana satu ataupun lebih lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung pada proses penyusunan kebijakan kolektif secara formal, berorientasi pada konsensus, serta konsultatif yang tujuannya guna menyusun ataupun menerapkan kebijakan publik dan pengelolaan program ataupun aset publik.

Dari tafsir tersebut, yang memberi penekanan pada enam kriteria. Pertama, pemrakarsa forum haruslah lembaga publik; kedua, partisipannya

harus non-pemerintah; ketiga, kewajiban partisipan guna melibatkan diri secara langsung pada penyusunan kebijakan serta tak sekadar "berkonsultasi" dengan pemerintah; dan keempat, forum tersebut diharuskan diorganisir secara formal serta memiliki pertemuan rutin. Kelima, keputusan harus disepakati bersama, dan keenam, kerja sama harus berkonsentrasi pada kebijakan publik ataupun manajemen publik. Selain itu, tata kelola kolaboratif dapat merujuk pada situasi di mana para aktor saling bergantung satu sama lain. Kehendak guna menjalankan *Collaborative Governance* timbul akibat kesadaran para aktornya atas keterbatasan yang dimilikinya, sehingga mereka harus menyatakan kehendaknya guna terikat dengan aktor lainnya. Legitimasi yang aktor lainnya miliki harus diakui oleh aktor-aktor yang terlibat (Luqito & Arrozaaq, n.d.).

Proses kolaborasi dilaksanakan pada beberapa tahapan, tahapan tertentu dalam model kolaborasi menjadi strategi esensial dalam bidang manajemen urusan publik. Menurut Ansell & Gash, proses *collaborative governance*, di antaranya:

a. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Dialog tatap muka adalah suatu kondisi yang terdiri dari diskusi langsung atau interaktif antara semua pihak yang berpartisipasi untuk mendiskusikan kepentingan bersama. Manajemen kolaboratif pada dasarnya berorientasi kepada prosesnya, sehingga dialog tatap muka sangat esensial guna menemukan peluang beserta keuntungan bersama. Dialog ini bukan hanya

sekedar negosiasi sementara, tetapi dapat meminimalisir perbedaan pendapat.

b. Membangun kepercayaan (*Trust building*)

Pada awal proses kolaborasi, ada kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Kolaborasi adalah upaya untuk membangun kepercayaan di antara para aktor yang terlibat, bukan hanya negosiasi antar pemangku kepentingan. Setelah proses kerja sama pertama dimulai, sangat penting untuk membangun kepercayaan. Hal ini untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan tidak terlibat dalam egoisme kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang sadar akan pentingnya kerja sama untuk membangun kepercayaan.

c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

Dalam proses kolaborasi, barang tentu komitmen mempunyai hubungan yang kuat. Perihal tersebut menjadi dorongan guna berpartisipasi ataupun terlibat pada tata kelola kolaboratif, dan kuatnya komitmen dari setiap pemangku kebijakan sangat dibutuhkan guna mencegah risiko dari proses kolaborasi. Namun, meskipun komitmen menjadi ihwal yang sulit pada kolaborasi, para pemangku kepentingan harus dapat bertanggung jawab untuk melihat hubungan yang tercipta sebagai ihwal yang baru serta harus ditingkatkan.

d. Sikap saling memahami (*Share understanding*)

Para pemangku kepentingan juga harus terlibat dalam diskusi kolaboratif yang sama untuk saling memahami atau menginformasikan satu sama lain tentang tujuan yang dapat dicapai melalui kolaborasi. Saling berbagi pemahaman tersebut, yang bisa digambarkan sebagai ideologi, visi, misi, tujuan bersama, dan banyak lagi. Jadi, ini bisa berarti ada kesepakatan untuk menjelaskan suatu masalah.

e. Hasil antara (*Intermediate outcomes*)

Hasil dari kerja tim yang efektif pada akhirnya adalah *output*. Hasil dari proses yang sangat penting untuk bersatu dalam mengembangkan dorongan yang dapat menghasilkan kolaborasi yang sukses. Hasil antara ini akan muncul ketika tujuan dan manfaat kolaborasi relatif jelas. Di antara elemen-elemen proses kolaborasi adalah diskusi, membangun kepercayaan, komitmen atas proses, pemahaman bersama, serta hasil.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi konseptual ialah sebuah definisi dengan variabel yang menekankan serta menjelaskan suatu konsep dengan menggunakan konsep (kata-kata), tanpa menunjukkan deskriptor, indikator, atau metode untuk mengukurnya. Definisi konseptual sangat penting untuk

penelitian karena dapat memperjelas masalah yang akan diteliti. (Yusi et al., 2017). Pada riset ini, membahas mengenai:

1. *Collaborative governance* ialah suatu proses serta struktur pada pengambilan keputusan serta manajemen publik yang melibatkan berbagai individu dalam membangun di lembaga-lembaga publik, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mencapai tujuan yang tak bisa dicapai oleh satu pihak saja, tetapi beberapa pihak (Mutiarawati, 2021). Untuk itu, pengembangan kampung nelayan menjadi kawasan wisata bahari melibatkan beberapa pihak atau pemangku kepentingan seperti perusahaan swasta dan masyarakat Kampung Selangan.

Definisi operasional pada riset ini memanfaatkan sejumlah teori yang sudah disebutkan di atas serta digunakan untuk menjelaskan berbagai indikator kerjasama pemerintah. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses kerjasama antara stakeholder dengan pemerintah dalam mengembangkan kawasan wisata bahari Untuk mengetahui dimensi dan indikator bisa kita lihat dalam tabel:

Tabel 1.1
Operasional Konsep

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator
<i>Collaborative Governance</i>	Dialog tatap muka (<i>Face to face dialogue</i>)	1. Melibatkan pertemuan antara seluruh pihak yang mempunyai keterlibatan pada pengembangan kawasan wisata bahari yaitu Kampung Selangan. 2. Membahas masalah yang terjadi sebelum diskusi mengenai kolaborasi ini dimulai. 3. Membuat pemecahan masalah dan memunculkan respon awal masing-masing stakeholder untuk memulai diskusi dan membuat kolaborasi secara spontan di dalam masyarakat oleh para pelaku usaha atau penyedia jasa pariwisata.
	Membangun kepercayaan (<i>Trust building</i>)	1. Melibatkan upaya untuk saling menaruh kepercayaan antar stakeholder 2. Hal ini dilakukan di karenakan aturan dalam penyelenggaraan kampung wisata dan masing-masing memiliki tugasnya. 3. Memastikan bahwa semua pihak merasakan kenyamanan serta saling percaya satu dengan lainnya pada proses kolaboratif.

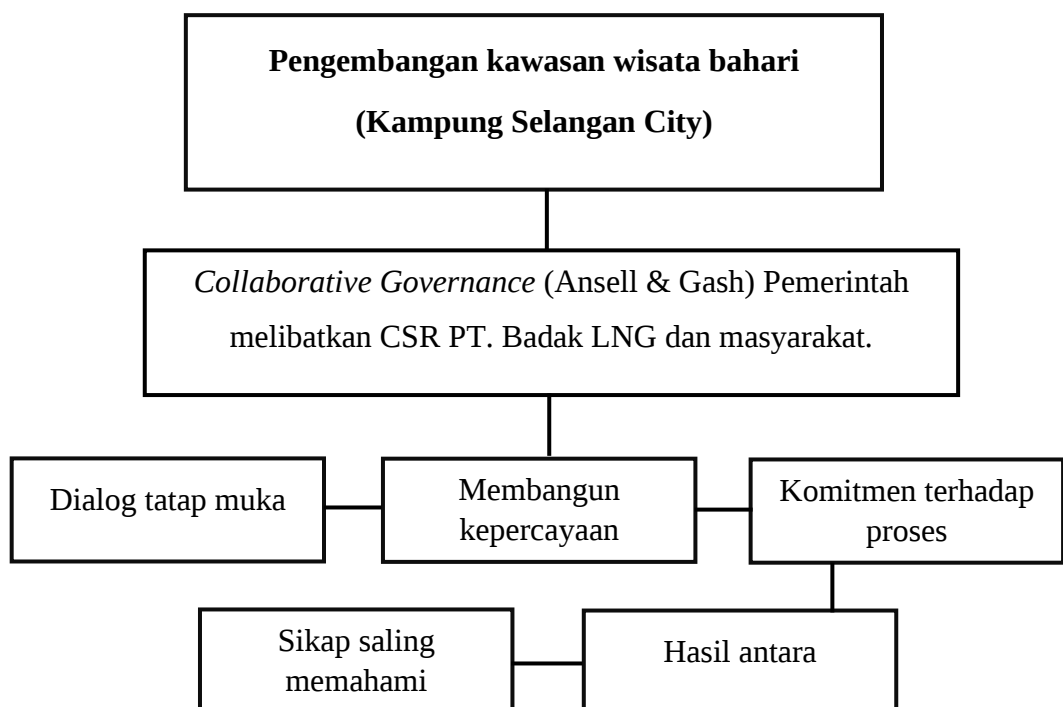
	Komitmen terhadap proses (<i>Commitment to process</i>)	1. Mendorong para peserta untuk terlibat dalam tata kelola kolaborasi atau proses kolaboratif. 2. Menghindari risiko yang ada dalam proses kolaborasi dan setiap pemangku kepentingan harus berkomitmen secara terus menerus. 3. Pemerintah berkomitmen untuk terus membina dan memasarkan kampung wisata secara menyeluruh salah satunya Selangan City sebagai mitra dari CSR PT. Badak LNG.
	Sikap saling memahami (<i>Shared understanding</i>)	1. Semua orang yang bekerja sama harus memiliki pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan dari proses kolaborasi. 2. Para aktor harus saling berkomunikasi tentang kebijakan dan program yang digunakan. 3. Untuk mengimplementasikannya yaitu diperlukan adanya kepercayaan satu sama lain dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan.
	Hasil antara (<i>Intermediate outcomes</i>)	1. Hasil dari sebuah proses kerjasama dalam mengembangkan dan memberdayakan Kampung Selangan.

		2. Memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kampung dan komponen-komponennya.
--	--	---

Sumber: Diolah penulis, 2024

1.8 Kerangka Pikir

Bagan 1.8
Kerangka Pikir



Sumber: Diolah penulis, 2023

Peneliti menyusun kerangka pikir ini untuk melihat beberapa indikator pada *collaborative governance* berdasarkan dari latar belakang dan teori-teori yang sebelumnya sudah dipaparkan dalam riset tentang pengembangan kawasan wisata bahari melalui *collaborative governance* di Selangan City Kota Bontang seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen atas proses, sikap saling memahami, serta hasil antara. Tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance* adalah sebuah usaha pemerintah guna menuntaskan kendala yang kompleks. Hal ini dilihat bahwa Kampung Selangan sebelumnya pernah mendapat bantuan-bantuan berupa fasilitas dan pinjaman uang, namun bantuan tersebut sudah tidak berjalan dan masyarakat Kampung Selangan tak bisa melanjutkan aktivitas pembudidayaan keramba serta bergantung kepada ikan hasil tangkapan semata. Sehingga, pemerintah melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang menekankan independensi dengan berbagai stakeholder yaitu perusahaan swasta dan masyarakat untuk kerjasama, berdiskusi, dan berinteraksi dengan menyelesaikan permasalahan tersebut agar Kampung Selangan dapat direvitalisasi menjadi salah satu obyek wisata (Akbar et al., 2022).

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Pada riset ini berjenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2018: 18) menafsirkan penelitian kualitatif sebagai jenis riset yang berdasarkan filsafat post-positivisme dan dipakai guna mengkaji keadaan objek secara

alamiah (sebagai perlawanan kata eksperimen). Peneliti memakai riset sebagai alat utama, menggunakan teknik triangulasi (gabungan) untuk mengumpulkan data, menggunakan analisis data secara induktif ataupun kualitatif, serta hasilnya lebih menegaskan makna dibanding generalisasi. Metode riset biasanya didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu. (Sugiyono, 2018:3).

Peneliti melihat bagaimana berbagai pihak yang mempunyai keterlibatan pada pengembangan kawasan wisata bahari yaitu pemerintah, masyarakat serta sektor swasta yang bekerja sama guna menggapai tujuan pengembangan kawasan wisata bahari secara berkesinambungan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik guna mengamati keadaan objektif secara alamiah di lapangan, yang mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat memahami fenomena sosial secara menyeluruh melalui penggunaan metode kualitatif serta menyajikannya baik dalam wujud kata-kata serta bahasa.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Kampung Selangan di Kota Bontang, yang menjadi subjek utama penelitian mengenai bagaimanakah kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta, serta masyarakat guna mengembangkan dan memberdayakan kawasan wisata bahari tersebut. Kampung Selangan dipilih sebagai objek wisata bahari karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan terus beradaptasi di tengah laut dan

program pengembangan Kampung Selangan yang berlangsung sejak tahun 2018 - 2024. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah khususnya pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang yang beralamat di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Riset ini melibatkan masyarakat Kampung Selangan dan berbagai pihak yang terkait dengan program CSR PT. Badak LNG karena Kampung Selangan merupakan kawasan wisata bahari yang berasal dari mitra binaan CSR PT. Badak LNG.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari fenomena, objek, dan individu yang mampu memberi data beserta informasi kepada peneliti untuk memecahkan masalah secara menyeluruh, Metode ini menggunakan pengetahuan yang dimiliki peneliti tentang sampel untuk menentukan ciri-ciri atau kebutuhan tertentu untuk tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang. Adapun berbagai pihak dari CSR PT. Badak LNG dan lingkup masyarakat Kampung Selangan, seperti ketua RT 16 Kampung Selangan, Pengelola Selangan City dan tokoh masyarakat Kampung Selangan.

1.9.4 Sumber Data

A. Data Primer

Data yang didapat secara langsung di lapangan serta diperoleh dari narasumber yang terkait sesuai dengan permasalahan disebut sebagai data

primer, sehingga dalam pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik, yakni pengamatan, wawancara, serta dokumentasi.

B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang penulis peroleh dari sumber yang sudah tersedia semisal dokumen, internet, buku, jurnal, serta sumber lainnya yang mempunyai keterkaitan guna melengkapi data primer riset.

1.9.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan adalah teknik data yang bisa dilaksanakan menggunakan berbagai cara, dikenal dengan istilah *setting*, berbagai sumber, serta berbagai cara. Dalam mengumpulkan data bisa dilakukan secara ilmiah pada latar ataupun (*natural setting*) dan tergantung berdasarkan sumber datanya sehingga pengumpulannya bisa dilakukan dengan memakai sumber primer ataupun sekunder (Sugiyono, 2018). Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data, di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dijalankan melalui pengajuan pertanyaan secara lisan guna mengumpulkan informasi dan data secara langsung dari informan. Teknik dalam pengumpulan data yang melandasi laporan mengenai diri sendiri ataupun *self-report* yang setidaknya berdasar wawasan beserta keyakinan personal. Manakala

peneliti hendak menjalankan studi pendahuluan guna mencari permasalahan yang harus dikaji serta dapat mengetahui beragam ihwal dari responden secara lebih mendalam serta total respondennya sedikit ataupun kecil.

2. Observasi

Observasi menjadi teknik mengumpulkan informasi yang memiliki ciri unik jika dibanding dengan teknik lainnya, seperti wawancara. Teknik pengumpulan informasi melalui observasi ini dapat diterapkan ketika melakukan penelitian tentang perilaku individu, proses kerja, berbagai gejala alam, serta situasi-situasi yang mana respons yang diamati tak terlampau besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sebuah metode dalam pengumpulan informasi melalui pengumpulan beberapa dokumen guna mendapat informasi yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Teknik ini dengan mendokumentasikan bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan mengembangkan kawasan wisata bahari yaitu Kampung Selangan City. Dokumentasi menjadi sebuah cara yang mana penulis dengan menggunakan metode kualitatif mampu memberi penggambaran mengenai perspektif subjek lewat materi secara tertulis ataupun dokumen lainnya yang dapat

dihasilkan individu-individu yang terlibat secara langsung (Herdiansyah, 2010).

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013: 240) mengatakan bahwasanya proses pencarian serta penyusunan data yang diperoleh secara sistematis berdasarkan *interview*, catatan lapangan, serta dokumentasi melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, memaparkannya ke dalam beberapa unit, menetapkan bagian, serta menyusun simpulan, sehingga memudahkan dirinya ataupun individu lainnya dalam memahaminya disebut sebagai teknik analisis data.

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data melalui pengamatan, *interview*, mendalam, serta dokumentasi. Pada tahapan permulaan, peneliti menjalankan eksplorasi atas situasi sosial ataupun objek kajian secara umum, seluruhnya diamati, didengar, serta direkam, sehingga data yang periset dapatkan beragam serta variatif.

2. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah perolehan data dari lapangan dengan total lapangan cukup banyak. Makin lama meneliti di lapangan, menjadikan makin banyaknya, kompleksnya, serta rumitnya jumlah data. Mengurangi data dengan merangkum dan memfokuskan pada

tema dan pola yang penting merupakan cara terbaik untuk mengurangi jumlah data.

3. Penyajian data (*Data display*)

Pada penelitian kualitatif, data tersaji dalam wujud uraian singkat, grafik, hubungan antarkategori, serta metode lainnya. Lewat cara tersebut, menjadikan data bisa terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan dan makin mudah memahaminya.